



KR-Driyanto

Suasana pembeli saat digelar pasar pangan murah di Kantor Dinsospermades.

Pemkab Banyumas Gelar Pasar Murah

BANYUMAS (KR) - Guna menstabilkan harga sembako, Pemkab Banyumas melalui Dinas Pertanian menggelar pasar murah di halaman belakang Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades), Senin (13/2). Kepala Dinas Pertanian Banyumas, Jaka Budi Santosa, menjelaskan pasar murah digelar rutin tiap hari Senin," kata Jaka. Menurutnya pasar murah digelar, sampai harga bahan pokok stabil. Pihaknya juga sudah menggelar operasi pasar beras dan saat ini harga beras sudah berangsur stabil.

"Beras sudah mulai stabil tapi beras pandan wangi masih agak sulit didapat. Bazar ini memungkinkan untuk keliling bukan hanya di sini saja, tapi kita fokuskan di kota dulu," jelas Jaka. Harga bahan pokok yang dijual di pasar murah beras medium Rp 9.000 - Rp 14.000/kg, beras pandan wangi Rp 13.600/kg. Gula pasir Rp 13.200/kg, minyak goreng Rp 15.000/liter. Bawang merah Rp 28.000/kg. Cabai merah keriting Rp 36.000/kg, dan cabai rawit merah Rp 48.000/kg. **(Dri)-d**

FPB Sukoharjo Minta Perusahaan Penuhi Hak Buruh

SUKOHARJO (KR) - Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo meminta kepada perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar hak buruh seperti gaji, upah lembur, pesangon dan lainnya. Sebab masih banyak kasus pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan buruh. Sekitar 3.000 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan dan dikurangi jam kerja dan diputus kontrak kerjanya sejak tahun 2022 sampai 2023.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, Kamis (9/2) mengatakan, FPB Sukoharjo terus memantau perkembangan kondisi buruh pada awal terhitung Januari sampai Februari 2023. Pemantauan dilakukan mengingat kasus pelanggaran terhadap buruh masih tinggi. Bentuknya seperti pemutusan kontrak kerja, pengurangan jam kerja, dirumahkan dan PHK.

Pelanggaran terjadi mengingat kasus pemutusan kontrak kerja dilakukan sepihak oleh pihak perusahaan. Buruh terpaksa kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat. Terlebih lagi pemutusan kontrak kerja dilakukan tanpa adanya alasan kuat. Buruh terpaksa kehilangan pekerjaan karena statusnya hanya sebagai tenaga kerja kontrak saja. Perusahaan bisa melakukan pemutusan kontrak kerja kapan saja. Namun demikian, buruh tetap berhak mendapatkan haknya seperti aturan berlaku.

"Semakin banyak buruh dengan status kontrak diputus sepihak oleh pihak perusahaan. Buruh seharusnya punya hak status menjadi buruh tetap dan tidak hanya kontrak. Namun perusahaan memanfaatkan status dengan memutus sepihak buruh kontrak," ujarnya. FPB Sukoharjo melihat dalam dua bulan pertama di tahun 2023 pada Januari dan Februari ini cukup besar. Banyak buruh kontrak diputus sepihak oleh pihak perusahaan dan terpaksa kehilangan pekerjaannya.

"Ada banyak, sekitar ratusan buruh kontrak yang diputus kontrak kerjanya oleh pihak perusahaan. Jumlahnya akan meningkat karena perkembangan kondisi perusahaan yang mengalami kesulitan ekonomi," lanjutnya. Bentuk pelanggaran lainnya dilakukan perusahaan kepada buruh. Sebab buruh banyak yang di PHK, dirumahkan, dikurangi jam kerja. Buruh dengan status tersebut belum terpenuhi semua haknya.

"Masih kami temukan buruh yang terkena PHK, dirumahkan dan dikurangi jam kerja belum menerima haknya seperti pesangon dan upah," lanjutnya. Sukarno mengatakan, pelanggaran lainnya terkait pemberian upah lembur bagi buruh. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut menjadi sorotan FPB Sukoharjo dan minta segera diselesaikan. **(Mam)-d**

Pelantikan 2.533 Pantarlih Pemilu 2024

SUKOHARJO (KR) - Sebanyak 2.533 orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pemilu 2024 Kabupaten Sukoharjo resmi dilantik. Usai pelantikan mereka akan bertugas melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2024. Pantarlih wajib mendatangi rumah pemilih untuk melakukan tugas memastikan data valid.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo Nuril Huda, Minggu (12/2) mengatakan, pelantikan terhadap 2.533 orang Pantarlih dilakukan secara serentak di masing-masing desa dan kelurahan. Jumlah Pantarlih yang dilantik di masing-masing desa dan kelurahan bervariasi.

Pelantikan Pantarlih baru dilakukan sekarang setelah ada perubahan jadwal dari KPU RI. Sebelumnya Pantarlih direncanakan dilantik pada Senin (6/2) namun diundur menjadi Minggu (12/2).

KPU Sukoharjo menurunkan petugas untuk melakukan monitoring pelaksanaan pelantikan Pantarlih di desa dan kelurahan. Usai pelan-

tikan, para Pantarlih tersebut mengikuti apel serentak dan dilanjutkan bimbingan teknis. Para Pantarlih tersebut usai dilantik diharuskan bertugas melakukan coklit data pemilih Pemilu 2024. KPU Sukoharjo sudah membekali data pemilih Pemilu 2024 kepada Pantarlih dalam bentuk digital online dan manual cetak kertas.

Data pemilih Pemilu 2024 tersebut nantinya dijadikan dasar bagi para Pantarlih untuk melakukan Coklit. Proses Coklit dilakukan Pantarlih dengan mendatangi satu persatu rumah pemilih berdasarkan data yang dimiliki KPU Sukoharjo. Cara tersebut dilakukan untuk menghasilkan data pemilih yang valid.

Sebab petugas melakukan pengecekan langsung dengan mendatangi rumah dan bertemu dengan pemilih berdasarkan data alamat dan nama yang dimiliki KPU Sukoharjo. Pantarlih setelah melakukan Coklit nantinya akan menempelkan stiker di rumah pemilih. Hal ini sebagai bukti bahwa pemilih tersebut telah didata oleh petugas.

"Ada 2.533 orang Pantarlih yang dilantik dimana satu orang tersebut bertugas Coklit di satu tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah TPS Pemilu 2024 sesuai dengan jumlah Pantarlih tersebut," ujarnya. Proses Coklit dilakukan Pantarlih dimulai 12 Februari sampai 14 Maret 2023. Batas waktu tersebut diharapkan bisa dimaksimalkan para Pantarlih untuk menyelesaikan tugas. "Waktu Coklit sesuai perhitungan KPU cukup bagi Pantarlih. Terlebih lagi Pantarlih sudah disediakan data pemilih dan tinggal mencocokkan saja dengan mendatangi rumah pemilih sesuai alamat dan nama," lanjutnya.

Dalam proses Coklit tersebut para Pantarlih diminta tetap berkoordinasi dengan KPU. Hal ini untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Apabila ada kendala maka bisa segera dikoordinasikan untuk dicari jalan keluar. "Selama Coklit tetap Pantarlih melakukan pelaporan perkembangan di lapangan. Data sudah dipegang dan tinggal pelaksanaan di lapangan saja," lanjutnya. **(Mam)-d**

Kota Magelang Komitmen Tuntaskan RTLH

RTLH sebanyak 200 unit. Penanganan RTLH juga berkolaborasi dengan Kodim 0705/Magelang. "Dua tahun ini kami mengalokasikan anggaran untuk penanganan RTLH melalui APBD 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 telah berhasil dilakukan kegiatan perbaikan RTLH dengan anggaran APBD sebanyak 187 unit rumah, sedangkan pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran dari APBD untuk perbaikan 730 RTLH," kata Bowo.

Untuk mengurangi backlog yang ada di Kota Magelang, lanjutnya, saat

ini Pemerintah Kota Magelang telah memiliki 3 (tiga) Rusunawa dan 2 (dua) Rumah Khusus (Rusus). Rusunawa yang telah terbangun tersebut berada di Kelurahan Potrobangsari, Kelurahan Wates, dan Kelurahan Tidar Utara. Sedangkan untuk lokasi Rusus berada di Kelurahan Wates dan Kelurahan Kedungsari. Saat ini Disperkim Kota Magelang masih terus mengupayakan untuk menambah jumlah Rusunawa atau Rusun atau Rusus di Kota Magelang.

Selain itu, Pemerintah

Kota Magelang, melalui Disperkim Kota Magelang, juga terus berupaya membangun rumah-rumah layak huni bagi MBR untuk mengurangi backlog dalam sektor kepemilikan rumah. "Tahun 2022 kami membangun perumahan berbasis komunitas sebanyak 20 unit di Kampung Gumuk Sepiring Kelurahan Tidar Utara, yang bersinergi dengan Kodim 0705/Magelang dan Bank Jateng," tambahna.

Bowo juga menambahkan, Kota Magelang mendapatkan bantuan hunian dari Pemerintah Provinsi Jateng melalui program "Tuku Lemah, Oleh Omah" di Kampung Tulung. Terdapat 21 unit rumah tipe 36 yang sudah dibangun dan dihuni oleh warga eks penghuni Rusunawa Potrobangsari yang memenuhi persyaratan. Dari data tahun 2022, kawasan kumuh di Kota Magelang tinggal 26,30 Ha. **(Tha)-d**



KR-Thoha

Bowow Adrianto saat menyampaikan penjelasan kepada wartawan.

Satlantas Polres Boyolali Temukan 506 Perkara

BOYOLALI (KR) - Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres Boyolali, mengencarkan Operasi Keselamatan Candi 2023 yang digelar mulai 7 - 20 Februari 2023. Dalam dua hari berlangsung, petugas mendapati ada sebanyak 506 perkara.

Kasat Lantas Polres Boyolali AKP Herdy M Pratama mengungkapkan, operasi keselamatan selama dua hari ini, pada hari pertama, Selasa (7/2), ditemukan ada 224 perkara dengan rincian 167 tilang dan 57 teguran. Kemudian di hari kedua, Rabu (8/2), ada sebanyak 282 perkara dengan rincian 213 tilang dan 69 teguran.

"Namun ini adalah langkah represif, dimana di operasi keselamatan ini yang dikedepankan adalah preventif dan preemtif," ujar Herdy, Jumat (10/2). Herdy menjelaskan, langkah preemtif yang sudah dilaksanakan adalah melaksanakan pembinaan ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengetahuan tentang dasar berlalulintas

yang baik dan benar. Serta disampaikan juga mengenai efek negatif penggunaan knalpot brong baik dari segi lingkungan maupun udara.

"Sehingga kami tekankan setelah kami melaksanakan apel atau menjadi pembina apel di sekolah kemudian lapangan surat-surat kendaraan parkirnya, sembari meng-

ajak para guru-guru dan murid-murid yang ada. Kita beri imbauan ini (knalpot brong) silakan diganti. Ini masih tahap pemberitahuan. Namun apabila nanti tetap digunakan maka siap-siap untuk ditilang," jelasnya.

Herdy menegaskan, selama operasi keselamatan berlangsung, masyarakat diminta untuk cek kembali kondisi kendaraannya apakah sudah standar atau belum. Termasuk kelengkapan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK.

"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk cek kondisi kendaraan, apakah kendaraan Anda sudah laik di jalan, dan apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat untuk mengendarai kendaraan, seperti apakah Anda sudah memiliki SIM, apakah Anda sudah memenuhi kewajiban membayar pajak melalui STNK, dan juga terdapat SPDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas di jalan," imbuhnya. **(R-3)-d**

Diusulkan Ada TPS Khusus pada Pemilu 2024



KR-Thoha

Proses coklit saat berlangsung di kediaman Bupati Magelang.

berkaitan dengan jumlah Pantarlih untuk Pemilu 2024 mendatang di Kota Magelang, dikatakan Basmar, tercatat ada 350 orang. Untuk setiap TPS nantinya 1 Pantarlih. Dikatakan juga, dibanding Pemilu 2019 lalu, pada Pemilu 2024 mendatang memang dimaksimalkan untuk 1 TPS nantinya untuk 300 pemilih. Pada Pemilu 2019 lalu di Kota Magelang terdapat 407 TPS, pada Pemilu 2024 mendatang ada 350 TPS.

ada aturan tidak boleh memisah RT, yang akhirnya pemetaannya untuk 1 TPS jumlah pemilihnya bisa tidak sampai 300 orang, ada yang sekitar 200 orang atau mendekati 200 orang. Kalau pada Pemilu 2024 mendatang jumlahnya di atas 260 orang, sehingga ti-

dak menutup kemungkinan terjadi pemisahan RT. "Yang jelas tidak boleh ada pemisahan Kartu Keluarga (KK)," katanya.

Ketua KPU Kabupaten Magelang Affiuddin secara terpisah kepada KR usai pelaksanaan Coklit di kecamatan Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP di wilayah Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, Minggu, diantaranya mengatakan di wilayah Kabupaten Magelang pada Pemilu 2024 mendatang tidak ada TPS Khusus. Meskipun demikian ada tempat-tempat khusus yang memiliki potensi ada TPS-nya.

Ini seperti di pondok pesantren maupun lainnya. Ada yang sudah mengajukan izin untuk itu. Prose-

durnya, dari lembaga pendidikan, perusahaan atau dari lembaga-lembaga tertentu mengajukan ke KPU RI melalui KPU Kabupaten Magelang. Dibenarkan, ada persyaratan khusus dalam hal ini. Yang dibuatkan TPS di lokasi khusus adalah yang pada saat dilaksanakan pemungutan suara tidak mungkin untuk meninggalkan tempat.

Di wilayah Kabupaten Magelang jumlah Pantarlih Pemilu 2024 tercatat 4.398. Jumlah ini sama dengan jumlah TPS nantinya. Dibanding Pemilu 2019, jumlah TPS pada Pemilu 2024 lebih banyak dengan selisih 67 TPS. Setiap TPS nantinya maksimal untuk 300 pemilih. **(Tha)-d**



Pers Diminta Jaga Kondusivitas Daerah di Tahun Politik

MEMPERINGATI Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono mengapresiasi peran pers sebagai pilar demokrasi keempat. Selama ini, pers terbukti mampu mewujudkan cita-cita demokrasi dengan mendorong partisipasi masyarakat serta menjaga kondusivitas bangsa. Pers juga mampu menjaga independensinya, tidak mudah ditarik-tarik pada kepentingan kelompok/golongan, sehingga tidak menjadi pers yang partisan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan di Semarang Senin (13/2), terkait dengan hari pers nasional (HPN). Pada Pemilu 2019, pers terbukti sukses mengawal gelaran demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum terumit. Pada Pemilu 2024

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jateng Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan di Semarang, Senin (13/2), terkait dengan hari pers nasional (HPN). Pada Pemilu 2019, pers terbukti sukses mengawal gelaran demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum terumit. Pada Pemilu 2024



KR-Budiono

Ferry Wawan Cahyono

menyampaikan pesan-pesan demokrasi, tidak mudah ditarik-tarik pada kepentingan kelompok/golongan, sehingga tidak menjadi pers yang partisan. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan di Semarang, Senin (13/2), terkait dengan hari pers nasional (HPN). Pada Pemilu 2019, pers terbukti sukses mengawal gelaran demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum terumit. Pada Pemilu 2024

mendatang, pers diharapkan kembali bisa berperan positif dalam mewujudkan cita-cita demokrasi, sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti.

Di era globalisasi informasi, negara membutuhkan kehadiran pers dengan perspektif yang jernih dan turut berperan dalam melawan kekacauan informasi, hoaks, ujaran kebencian yang mengancam kehidupan demokrasi. Peran pers dalam pemerintahan juga cukup besar, karena pers mampuewartakan agenda pemerintahan sekaligus memberikan kritik. Untuk itu ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi agar masyarakat mendapatkan konten berita yang baik.

Pada sisi kebudayaan, Pers juga memiliki tanggung jawab. Pers turut menentukan mana sebuah peradaban akan dibawa. Peran pers dalam membawa informasi yang baik harus terus dilaksanakan. Media yang memproduksi serta mendeliver berbagai macam nilai keluhuran, keagungan, dan kesempurnaan dari peradaban bangsa. □-d

(Disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Ferry Wawan Cahyono kepada wartawan KR Biro Semarang Budiono Isman-Anf)